

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2001- 2005**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi landasan dan pedoman Bagi pelaksana Pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai bagian dari wilayah Propinsi yang merupakan bagian integral dan menyatukan diri dengan Pembangunan nasional dan Regional maka perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang sekaligus merupakan penjabaran dari Garis-Garis Besar Haluan Negara berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IV/MPR/ 1999;
- b. bahwa untuk memberikan Kejelasan arah dan pedoman Pelaksana Pembangunan Daerah sebagai Usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional dan Regional maka perlu ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2001-2005 yang ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/ MPR/ 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan dati II Waykanan, kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.